

Pencemaran Lingkungan 13 Sungai Masih Tercemar



Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta dinilai tidak serius menjaga kebersihan sungai di Ibu Kota. Pasalnya, 13 sungai di Jakarta yang sejak tiga bulan lalu tercemar bakteri E-coli, hingga saat ini, kondisinya masih sama.

Penilaian itu disampaikan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Selasa (12/7).

"Kinerja BPLHD DKI sangat mengecewakan. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga itu," kata anggota DPRD DKI dari Komisi D Syahril.

Syahril mengatakan tercemarnya sungai bisa mengancam kesehatan masyarakat. Air sungai mengandung berbagai macam bakteri berbahaya, seperti E-coli. Untuk itu, penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. Setiap pabrik yang kedapatan membuang limbah ke sungai harus dikenai sanksi tegas.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra S Andyka menambahkan sungai-sungai yang tercemar tersebut adalah Mookevar, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Kali Baru Barat, Ciliwung, Kali Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung.

"Itu membuktikan bahwa kebijakan Gubernur yang concern terhadap lingkungan, seperti Car Free Day dan penambahan ruang terbuka hijau, tidak mendapat dukungan dari bawahannya (BPLHD)," kata dia.

Karena itu, dia menyarankan Gubernur DKI Fauzi Bowo segera mengevaluasi personel di BPLHD DKI Jakarta. "Kami minta Gubernur secepatnya memperhatikan hal ini. Sebab kalau dibiarkan lebih lama, kondisi lingkungan Jakarta bisa semakin buruk," katanya.

Ketua Walhi DKI Jakarta Ubaidillah mengatakan bahwa hampir semua kinerja BPLHD DKI tidak berdampak langsung pada masyarakat. Menurut dia, program-program yang dijalankan BPLHD lebih banyak pada program seremonial semata. Misalnya program uji emisi melalui bagi-bagi stiker, atau program pemberian penghargaan pada perusahaan yang tidak menggunakan kantong plastik.

Seharusnya, lanjut Ubaidillah, anggaran yang jumlahnya cukup besar, yakni 1.29 triliun rupiah, bisa dimanfaatkan untuk program nyata, misalnya untuk pemberdayaan masyarakat agar tak mengotori sungai atau untuk membeli alat penyaring air sungai. Dengan begitu, ancaman bahaya pencemaran oleh bakteri dan zat berbahaya lainnya bisa diminimalisasi.

"Kalau anggaran hanya dihamburkan untuk kegiatan seremonial saja, kasihan masyarakat karena tak bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Sementara itu, Kepala BPLHD DKI Jakarta Peni Susanti tidak bersedia menjelaskan mengapa tidak ada tindak lanjut terhadap laporan pencemaran 13 sungai di Ibu Kota. Dia hanya mengatakan upaya penanganan sungai tercemar telah dilakukan melalui ajakan bersih-bersih sungai. "Kami telah memiliki program bersih-bersih sungai," katanya.